

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Upaya pemerintah untuk mewujudkan *Good Government Governance* (GGG) sejak tahun 2003 telah mengeluarkan undang-undang pengelolaan keuangan negara yang meliputi UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga paket UU ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara sekaligus menuntut suatu perubahan mendasar di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara (Anwar, 2009 dalam Silviana, 2013).

Bentuk pertanggungjawaban keuangan negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyajikan laporan keuangan. Salah satu faktor pendukung dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan yang dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada *input* yang baik, proses yang baik dan *output* yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik (Selamet, 2011 dalam Silviana, 2013).

Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Oleh

karena itu, informasi di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakai. Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang disebutkan dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005) terdiri dari : (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten. Dukungan sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang memadai akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut (Winidyaningrum, 2010).

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan

kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Kemampuan sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dapat dirancang melalui suatu sistem pengendalian internal dengan tujuan umumnya adalah efisiensi dan efektivitas operasi. Pengendalian internal dalam organisasi akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran organisasi. Aspek yang paling penting dari pengendalian internal adalah personel. Jika karyawan adalah orang yang kompeten dan bisa dipercaya, pengendalian lain bisa tidak ada dan laporan keuangan yang bisa diandalkan masih bisa dihasilkan (Arens, 2003:397-404 dalam Yosefrinaldi, 2013)

Penyusunan laporan keuangan daerah harus menerapkan sistem akuntansi. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Sistem informasi akuntansi adalah suatu bagian organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Sistem informasi akuntansi ini dirancang oleh suatu organisasi untuk memenuhi fungsinya guna menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Suatu sistem informasi akuntansi

terkandung unsur-unsur pengendalian, sehingga sangat mempengaruhi fungsi manajemen dalam melakukan pengendalian internal. Fungsi sistem informasi akuntansi berperan sekali atas pengendalian yang dilakukan perusahaan (Suryandi dkk, 2011 dalam Indralesmana dan Suaryana, 2014).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Bertempat di Ruang Sidang Paripurna, DPRD Kabupaten Ponorogo menggelar sidang paripurna dengan agenda pengesahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan pemerintah (LKP) kabupaten Ponorogo yang di pimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Ponorogo H. Ali Mufthi, S.Ag, Rabu (3/6/2015).

Dalam laporannya Panja DPRD Kabupaten Ponorogo memberikan apresiasi yang tinggi . Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo karena usahanya yang sungguh-sungguh berhasil mempertahankan opini

wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ketiga atas LKP Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa timur.

Meskipun demikian, Panja DPRD Kabupaten Ponorogo melihat bahwa SILPA tahun anggaran 2014 Rp. 189.529.114.681,88 masih terlalu besar. Hal tersebut dikarenakan adanya program-program yang tidak bisa dilaksanakan sehingga banyak anggaran belum terserap. Oleh karena itu panja DPRD Kabupaten Ponorogo mendorong Bupati Ponorogo agar kedepan untuk merencanakan program-program secara lebih akurat sehingga anggaran dapat terserap yang pada akhirnya SILPA menjadi sedikit.

Adapun rekomendasi dan kesimpulan dari panja DPRD Ponorogo antara lain Peraturan daerah tentang penyertaan modal segera diwujudkan, Pengelolaan asset daerah perlu ditata kembali sesuai standart akuntansi pemerintahan, Penanganan piutang Pemerintah Daerah perlu diintensifkan, Penata usahaan manajemen pengelolaan obat dan BHP di RSUD Dr. Harjono Ponorogo secara keseluruhan, segera malakukan verifikasi dan validasi piutang pajak bumi dan bangunan, dan Pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dana bantuan hibah tidak hanya ketepatan penerima sesuai dengan peraturan.

Bupati Ponorogo H. Amin, SH saat di konfirmasi menyampaikan ucapan terima kasih karena laporan keuangan Pemerintah Daerah di terima dan disetujui oleh DPRD, meskipun ada beberapa catatan. Hal itu akan menjadi bahan perhatian dan pertimbangan pemerintah, dan kedepan akan

diperbaiki untuk langkah berikutnya dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Ponorogo, hal ini yang disampaikan H. Amin,SH.

Ketua Panja DPRD, H. Slamet Hariyanto, SH., saat di konfirmasi Radar Bangsa se usai sidang berlangsung mengatakan bahwa dengan berbagai catatan dan rekomendasi yang sudah di setuju oleh anggota Dewan, semoga Pemerintah Daerah dapat terus meningkatkan kinerjanya sehingga berbagai permasalahan yang ada dapat di atasi (<http://www.jejakkasus.com/berita/dprd-kabupaten-ponorogo-sahkan-lhp-bpk-atas-lkp-kabupaten-ponorogo/>).

Penelitian terdahulu meneliti tentang organisasi perangkat daerah di daerah Tasikmalaya dan belum ada penelitian di daerah Ponorogo. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menambah literatur dengan menunjukkan seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Lebih lanjut secara spesifik pada bagian ini fenomena tersebut akan diangkat dalam penelitian dengan judul “PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Ponorogo)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengemukakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas yang berada di pemerintah kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas yang berada di pemerintah kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas yang berada di pemerintah kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan

- a. Mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas yang berada di pemerintah Kabupaten Ponorogo
- b. Mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas yang berada di pemerintah Kabupaten Ponorogo
- c. Mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan

keuangan daerah pada Dinas yang berada di pemerintah Kabupaten Ponorogo

1.3.2. Manfaat

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

a. Peneliti

Penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang ingin diketahui dan menambah pengetahuan.

b. Bagi instansi pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan baru bagi instansi pemerintah agar bisa meningkatkan kompetensi SDM dan penerapan sisten informasi akuntansi keuangan sehingga didapatkan kualitas laporan keuangan yang baik.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai perbandingan bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah.

d. Peneliti selanjutnya

Penelitian ini sebagai referensi ilmiah mengenai masalah laporan keuangan daerah yang akan diteliti.